

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kondisi penyerapan anggaran 7 satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran 7 satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang, dengan pengaruh yang bersifat negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kesalahan dokumen perencanaan yang dihasilkan pada satuan kerja tidak mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Permasalahan tersebut diakibatkan adanya revisi dokumen perencanaan menyebabkan kegiatan terlambat dilaksanakan, pembahasan anggaran terlalu lama di DPRD, serta adanya pemblokiran terhadap program dan kegiatan.
2. Pencatatan Administrasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran 7 satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang, dengan pengaruh yang bersifat negatif. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kesalahan pencatatan administrasi yang dilakukan oleh satuan kerja menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Permasalahan tersebut diakibatkan DIPA perlu di revisi karena tidak sesuai kebutuhan, adanya kesalahan penentuan mata anggaran sehingga perlu direvisi, kelengkapan SPM yang diajukan ke KPPN masih kurang.
3. Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran 7 satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang, dengan pengaruh yang bersifat negatif. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pada beberapa satuan kerja kota Palembang tidak mempengaruhi rendahnya

penyerapan anggaran. Permasalahan tersebut diakibatkan sering terjadinya mutasi atau pergantian pejabat yang berkaitan pengelolaan keuangan, penunjukkan pejabat pengelola keuangan yang terlambat.

4. Dokumen pengadaan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggaran 7 satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang dengan pengaruh yang bersifat negatif. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kesalahan penyusunan dokumen pengadaan yang dilakukan oleh satuan kerja kota Palembang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Permasalahann tersebut diakibatkan karena lamanya proses tender disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran masih kurang memahami ketentuan pengadaan dan pelaksanaannya serta permasalahan penstandaran biaya dilapangan.
5. Uang Persediaan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Anggara 7 satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang. Hal ini menunjukkan semakin tinggi mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh satuan kerja menyebabkan tingginya penyerapan anggaran. Permasalahan tersebut diakibatkan adanya pengajuan uang persediaan sebanyak 2 kali dikarenakan kebutuhan operasional kantor yang membutuhkan dana cukup besar, dan satuan kerja tidak pernah memiliki sisa UP yang harus disetorkan ke Kas Negara.
6. Dokumen Perencanaan (DPR), Pencatatan Administrasi (ADM), Sumber Daya Manusia (SDM), Dokumen Pengadaan (DPN), dan Uang Persediaan (UP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kualitas dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan uang persediaan secara simultan maka akan meningkatkan penyerapan pada anggaran satuan kerja.

## 5.2 Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan administrasi, dokumen pengadaan, dan uang persediaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran 7 satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang, sedangkan dokumen perencanaan dan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat diindikasikan 7 Satuan Kerja di wilayah KPPN kota Palembang memiliki permasalahan dalam hal tersebut, adapun saran yang dapat penulis berikan kepada satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan

Anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPR” sebanyak 60% responden menjawab dengan skala 2 (pernah). Berdasarkan indikator yang disebutkan, diharapkan kedepannya Satuan Kerja di wilayah KPPN kota Palembang dapat melakukan beberapa upaya seperti penyusunan anggaran harus dilengkapi dengan data pendukung yang lengkap dan valid, melakukan pembahasan yang konstruktif dengan DPR, mengalokasikan anggaran yang telah memiliki dasar hukum, dan membuat rencana kegiatan yang dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan.

2. Pencatatan administrasi

Kesalahan SPM karena kurang memenuhi syarat sebanyak 44.4%, rata-rata responden menjawab dengan skala 2 (pernah), dan Kesalahan dalam penentuan akun sehingga perlu revisi dokumen anggaran sebanyak 42,2% rata-rata responden menjawab dengan skala 2 (pernah). Berdasarkan indikator disebutkan, diharapkan PPK di setiap satuan kerja membuat SOP yang mengatur mekanisme pencairan SPM diawal tahun anggaran dan memantau secara ketat implementasinya selama tahun anggaran berjalan. Penyusunan kegiatan harus benar-benar memperhatikan atau mengikuti akun yang benar sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

### 3. Sumber Daya Manusia

Pejabat/pegawai di satuan kerja sering mengalami mutasi/pergantian yang melibatkan pejabat pengelola keuangan” sebanyak 64,4% responden menjawab dengan skala 2 dan SK Penunjukan/Penggantian Pejabat Perbendaharaan KPA, PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran terlambat ditetapkan. sebanyak 48,9% responden menjawab dengan skala 2 (pernah). Berdasarkan indikator permasalahan diatas, diharapkan kedepannya KPA di setiap satuan kerja harus segera menerbitkan SK pengangkatan/ PPK, Pejabat Penanda Tangan SPM dan Bendahara segera setelah diterima SK Penetapan KPA.

### 4. Penyusunan dokumen pengadaan

Dalam pengadaan barang dan jasa, biaya di lapangan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK), sebanyak 53,3% responden menjawab dengan skala 1 (Tidak Pernah), dan HPS ditentukan berdasarkan keahlian dan melalui survei pasar sebanyak 64,4% responden menjawab dengan skala 1 (Tidak Pernah). Berdasarkan indikator permasalahan yang telah disebutkan, diharapkan satuan kerja kedepannya dalam hal kesulitan menyusun HPS, Penyusunan HPS oleh pejabat yang ditunjuk harus bekerja secara professional, atau dapat menggunakan pihak ketiga yang memiliki keahlian.

### 5. Mekanisme Uang Persediaan

Adanya sisa UP/TUP yang harus disetorkan ke kas negara” sebanyak 62,2% responden menjawab dengan skala 1( Tidak Pernah), dan “Adanya pengajuan Uang Persediaan (UP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar” sebanyak 51,1% responden menjawab dengan skala 2 (pernah). Berdasarkan indikator permasalahan diatas, diharapkan kedepannya satuan kerja dapat selalu memaksimalkan penggunaan uang persediaan untuk keperluan operasional kantor agar kas di bendahara pengeluaran terhindar dari *idle cash*, dan untuk pengajuan TUP sebanyak 2 kali dalam waktu satu bulan,

satuan kerja di haruskan mempertanggungjawabkan TUP dalam waktu 1 (satu) bulan, dan apabila TUP tidak habis digunakan satuan kerja diwajibkan menyetorkannya ke kas negara paling lambat 2 hari kerja.

6. Berdasarkan 5 faktor permasalahan dan indikatornya yang telah diuraikan, diharapkan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah, khususnya satuan kerja di wilayah KPPN kota Palembang untuk membenahi permasalahan- permasalahan yang dialaminya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan memaksimalkan penyerapan anggaran guna meningkatkan mutu pelayanan kepada publik, serta meningkatkan proses pembangunan nasional.